PERKEMBANGAN PESANTREN DI JAWA TIMUR (1900-1942)

Joko Sayono

Abstract: As Islamic educational institutions as well as social institutions, *pesantren* constitute important part in forming the structure of society in East Java, especially in religious domains. The *pesantren* have shown successful growth in the regions where the society haven't become Islamic. At the same time, *pesantren* development has become a medium of religious ideology distribution across the society through intellectual tradition (*kitab kuning*). In East Java the religious-thinking ideology spread by the *kiai* and the *pesantren* is predominantly that of *ahlus sunnah wal jamaah*, *fiqh.* and *tasawuf* ideology. The *tasawuf* has been growing in the form of *tarekat* since the beginning of the 20the century, engendered particularly by the *qadiriyah* and *naqsabandiyah* schools in Pesantren Rejoso, Jombang.

Key words: pesantren, kiai, kitab kuning, tarekat.

Terbatasnya studi historis tentang pesantren telah mengakibatkan kurang terungkapnya kedudukan dan peran pesantren dalam sejarah Indonesia, padahal pesantren merupakan salah satu kekuatan sejarah yang ikut menjadi latar belakang gerakan-gerakan Islam di Indonesia (Kuntowijoyo, 1987). Oleh karena itu kajian historis sangat diperlukan. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa alasan yakni *pertama* pada awal abad XX sampai berakhirnya pemerintah kolonial Belanda (1900-1942) pesantren menunjukkan kemampuan mempertahankan keberadaan dirinya di bawah tekanan dan pengawasan pemerintah kolonial. *Kedua*, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya pendidikan model Barat, tidak mempengaruhi

Joko Sayono adalah dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

perkembangan pesantren. Dalam konteks ini pesantren sebagai lembaga pendidikan dapat melakukan adaptasi dengan tuntutan masyarakat. *Ketiga*, secara akademis perkembangan pesantren juga sangat menarik untuk dikaji, karena pesantren merupakan pusat studi dan penyebaran ilmu pengetahuan keagamaan.

Kajian historis terhadap pesantren secara utuh diharapkan memberikan sumbangan terhadap penulisan sejarah, khususnya sejarah sosial masyarakat Jawa Timur. Perkembangan pesantren yang meluas di wilayah Jawa Timur pada awal abad XX merupakan fenomena historis dan sosial yang jika dikaji akan dapat memberikan penjelasan terhadap struktur masyarakat dewasa ini. Khususnya berkaitan dengan bentuk perilaku keagamaan dan berbagai aspek yang terkait di dalamnya.

Dari uraian di atas banyak hal yang dapat dikaji, akan tetapi pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini diarahkan pada beberapa hal. *Pertama*, bagaimanakah perkembangan jalinan mata rantai pesantren di Jawa Timur pada tahun 1900-1942. *Kedua*, bagaimanakah proses penyebaran tradisi keilmuan Islam berlangsung dan pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran masyarakat. *Ketiga*, bagaimanakah perkembangan tarekat di Jawa Timur abad XX. *Keempat*, bagaimanakah hubungan pesantren dengan kekuasaan kolonial.

METODE

Sebagai kajian historis maka metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah meliputi empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah tahap mengumpulkan sumber sejarah secara sistematis dan effektif dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Tahap kritik adalah menilai sumber-sumber yang diperoleh secara kritis. Tahap interpretasi adalah pemberian tafsir atau makna pada sumber yang telah di kritik agar dapat ditemukan keterkaitan antara sumber yang satu dan lainnya, tahap historiografi adalah tahap penulisan sejarah yakni menyajikan suatu gambaran yang utuh tentang pokok permasalahan yang dikaji.

Skope temporal penelitian adalah abad XX dengan batasan tahun 1900-1942, dasar pemikirannya bahwa pada masa tersebut terjadi perubahan sosio-kultural yang sangat fundamental dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut sangat menentukan perjalanan sejarah Indonesia di masa-

masa berikutnya.

Desain penelitian yang dikembangkan adalah bentuk eksploratif, artinya suatu penelusuran sumber-sumber kearsipan dan kepustakaan yang memungkinkan ditemukannya data-data historis baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (Lictmjan, 1978). Melalui pendekatan multidimensional maka pemahaman terhadap sumber-sumber tersebut akan menggunakan berbagai konsep ilmu sosial, khususnya antropologi dan sosiologi. Di samping itu melalui wawancara dan mencermati tradisi lisan yang berkembang di pesantren, kekurangan sumber tertulis dapat diatasi.

Kerangka analisis yang dikembangkan sesuai dengan pendekatan multidimensional, dengan demikian konsep-konsep ilmu sosial akan banyak dilibatkan di dalamnya. Berangkat dari pemikiran Weber bahwa perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek keagamaan berasal dari para pemimpinnya (Weber, 1956; Gidden, 1986) maka perkembangan pesantren, khususnya terbentuknya jalinan mata rantai pesantren sangat ditentukan oleh kharisma, otoritas dan status sosial kiai sebagai pemimpin pesantren.

Taufik Abdullah menyatakan bahwa dalam mengkaji pesantren setidaknya harus dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, aspek internal pesantren. Cakupan indikator pertama meliputi kedudukan kiai sebagai sentral aktivitas pesantren, biografi kiai, hubungan kekerabatan kiai, sistem pendidikan yang dikembangkan di pesantren, dan keterikatan pesantren dengan organisasi sosial politik yang ada. *Kedua*, jalinan mata rantai pesantren, yakni suatu hubungan antara pesantren induk dan pesantren cabang. Jalinan tersebut tidak dapat digambarkan sebagai garis lurus akan tetapi bergerak secara tidak beraturan. Dari hubungan guru murid, hubungan antar murid, sampai pada orientasi teologis. *Ketiga*, hubungan pesantren dengan lingkungan sekitar (Abdullah, 1996). Tiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan mendukung satu sama lain.

Inti budaya dari tradisi keilmuan yang berkembang di pesantren adalah keberadaan Kitab Kuning (Yafie, 1989; van Bruinessen, 1999). Dari kitab kuning yang digunakan di pesantren dapat ditelusuri ilmu-ilmu keagamaan yang berkembang di pesantren, dan berdampak pada paham pemikiran keagamaan yang berkembang di masyarakat.

HASIL DAN BAHASAN

Perkembangan Pesantren Jawa Timur 1900-1942

Awal perkembangan pesantren di Jawa Timur dimulai pada akhir pemerintah Majapahit di daerah Ampeldenta Surabaya. Perkembangan pesantren di masa-masa selanjutnya tidak terungkap dengan jelas. Batasan tentang penggunaan sebutan pesantren juga belum jelas. Kriteria tentang pesantren dikembangkan oleh Zamakhsyari Dhofier dengan melihat adanya lima elemen pokok yang harus ada dalam pesantren (Dhofier, 1996). Lima elemen tersebut adalah pondok, masjid, santri, pengajaran kitab kuning, dan kiai. Berdasarkan kriteria tersebut maka Martin Van Bruinessen menyatakan bahwa pesantren yang tertua di Jawa Timur adalah Pesantren Tegalsari di Pacitan yang didirikan pada tahun 1710 (van Bruinessen, 1999).

Di Jawa Timur setelah pesantren Tegalsari tercatat beberapa pesantren besar yang berpengaruh, antara lain Pesantren Sidogiri Pasuruan didirikan tahun 1745, pesantren Panji Siwalan Sidoarjo didirikan tahun 1770, Pesantren Tremas Pacitan didirikan tahun 1830, Pesantren Langitan Tuban didirikan tahun 1852, Pesantren Jampes Kediri didirikan tahun 1886, Pesantren Guluk-guluk Sumenep didirikan tahun 1887, dua pesantren yakni Pademangan Bangkalan dan Maskumambang Gresik tidak diketahui dengan pasti kapan berdirinya, tetapi diperkirakan pada pertengahan abad 19 (Mas'udi1986). Di antara pesantren tesebut Pesantren Tremas, Langitan, Panji Siwalan, dan Pademangan Bangkalan adalah pesantren yang melahirkan kiai-kiai besar dan pesantren induk pada abad XX.

Secara umum perkembangan pesantren meningkat dengan cepat pada awal abad XX karena banyaknya orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji pada akhir abad 19 (Hurgronje, 1993; Kartodirdjo, 1984). Beberapa orang di antara haji tersebut berhasil mendirikan pesantren yang menjadi besar dan memiliki santri cukup banyak tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Pesantren tersebut antara lain Tebuireng, Rejoso, Lirboyo, Sukorejo, dan Gontor (Pondok Modern Gontor, 1941).

Pola hubungan antar pesantren di Jawa Timur didasarkan atas tiga hal. *Pertama* hubungan kekerabatan antar kiai, *kedua*, hubungan guru-murid, dan *ketiga* hubungan kesejawatan antar santri. Perpaduan tiga pola hubungan antar pesantren membentuk jaringan di seluruh wilayah Jawa Timur, yang dalam penelitian ini disebut sebagai jalinan mata rantai pesantren. Perpaduan

pola tersebut juga memberikan gambaran perkembangan pesantren secara kuantitatif yakni dalam jumlah dan perluasan penyebaran di wilayah Jawa Timur. Dengan demikian peta penyebaran pesantren di Jawa Timur abad XX dapat diketahui, sekaligus juga mununjukkan peran silsilah pesantren dalam memperkuat jalinan mata rantai pesantren tersebut.

Perkembangan pesantren di Jawa Timur pada abad XX tidak lepas dari keberadaan pesantren besar sebelum abad XX, yakni Pesantren Tegalsari, Tremas, Langitan, Panji Siwalan, Pademangan dan Sidogiri. Para kiai pendiri pesantren induk pada abad XX merupakan hasil didikannya. Pesantren induk merupakan pesantren yang alumninya banyak mendirikan pesantren baru. Pesantren tersebut adalah Pesantren Tebuireng, Rejoso, Lirboyo, Sukorejo, dan Gontor. Pesantren-pesantren telah memperluas dan memperbesar jalinan mata rantai pesantren di Jawa Timur di masa-masa berikutnya.

Tradisi Keilmuan Pesantren dan Perkembangan Pemikiran Keagamaan

Ilmu keagamaan yang berkembang di pesantren didasarkan atas pemikiran untuk memperdalam pemahaman tentang tauhid, fikih, dan berbagai masalah muamalah. Referensi yang digunakan adalah kitab kuning yang merupakan karya yang berasal dari Timur Tengah. Kitab kuning dikelompokkan menjadi tiga yakni kitab *matn*, *syarah*, dan *hasyiyah*. Kitab *matn* adalah kitab yang berisi uraian singkat dan padat, kitab *syarah* adalah kitab penjelasan secara lebih panjang apa yang ditulis dalam kitab matn. Kitab *Hasyiyah* adalah kitab yang berisi kritik, komentar, revisi dan berbagai pendapat ahli tentang hal-hal yang ditulis dalam kitab *matn* maupun *syarah*. Kitab kuning yang dipelajari di Indonesia disebut sebagai *Al Kitab al-Mutabarah* dalam lingkungan *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Mastuhu, 1994).

Dalam menemukan kebenaran suatu masalah, kitab kuning menggunakan metode *istimbathi, istiqra'i, takwini*, dan *jaddali*. *Istimbathi* adalah metode deduktif yang digunakan untuk menjabarkan dalil-dalil keagamaan menjadi masalah fikihiyah. *Istiqra'i* adalah metode induktif yang digunakan menetapkan hukum, *Takwini* adalah metode genetika yakni cara berpikir mencari kejelasan suatu masalah dengan melihat sebab-sebab terjadinya. *Jaddali* adalah metode dialektika yakni cara berpikir yang diangkat dari pertanyaan atau pernyataan seseorang yang diperdebatkan (Chozin, 1989).

Di Jawa Timur kitab kuning yang menjadi rujukan utama adalah kitab-kitab kuning yang tergolong dalam rumpun kitab fikih (van Den Berg, 1886). Judul kitab kuning yang populer adalah *Taqrib* dan *Fathal al-qarib* (ANRI. Ag. No. 44 Tanggal 4 Nopember 1890; van Bruinessen,1989). Hampir seluruh pesantren Jawa Timur menggunakan kedua kitab tersebut (Mas'udi,1986; Umam, dkk.Tt). Secara umum fikih tentang ubudiyah merupakan materi yang dipelajari di semua pesantren. Selain kedua kitab tersebut di atas terdapat beberapa kitab yang juga populer yaitu *Safinatun Najjah, Sullam at Taufiq, As-Sittin Mas'alah,* dan *Mutashar.* Setelah kitab tersebut baru dilanjutkan dengan kitab fikih lanjutan, baik yang berupa pendalaman materi ibadah ubudiyah maupun materi yang lain.

Kitab kuning rujukan yang digunakan di Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan dalam dua bidang kajian, yakni bidang tauhid dan fikih. Di bidang tauhid kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren Jawa Timur adalah pemikiran Asyari'ah yang berisi antara lain sifat, wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Judul kitab tersebut antara lain *Al-aqoid al Shubra, Aqidah al Syamsyiah, Matn Al-Jauharat, Matn Al Bajuri, dan Al-Kharidat Al-Baliyat.* Di bidang fikih kitab kuning yang digunakan sebagai rujukan di pesantren Jawa Timur adalah hasil pemikiran dari empat mazhab, terutama dari mazhab Syafii (Wahid, dalam Abdullah dan Sharon Siddique, 1989). Kitab fikih yang dipelajari antara lain *Taqrib, Safinat Al-Shalat, Safinat Al-Najah, Masail As-Sittin, Minhajul Qowim, Al Hawasyi al Madaniyat, Fath Al-Qarib, Al Iqna, dan Fath Al-Muin* (Departemen Agama, 1971).

Bersamaan dengan terjadinya penyebaran pesantren ke berbagai daerah, maka pemikiran keagamaan sebagaimana yang terkandung dalam kitab-kitab kuning juga ikut menyebar ke masyarakat. Paham ahlus sunnah wal Jamaah yang merupakan salah satu dari paham pemikiran Islam menjadi paham keagamaan yang ikut tersebar di Jawa Timur. Demikian pula dengan pemikiran empat mazhab dalam fikih, dan pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Junaid Al-Bagdadi. Pandangan bahwa pesantren telah menghentikan budaya pikir dengan taqlid pada pendapat sebelumnya tidak sepenuhnya benar, karena dari pesantren juga muncul karya-karya ilmu keagamaan yang diakui memiliki bobot keilmuan.

Pesantren Jawa Timur dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat membenahi diri dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan. Sistem pendidikan yang lebih bersifat individual mulai dilengkapi dengan sistem klasikal. Sistem madrasi mulai dilak-

sanakan di berbagai pesantren, Pesantren Tebuireng adalah pesantren pertama yang melakukan perubahan-perubahan. Kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) merupakan wujud dari kalangan pesantren menghadapi perubahan yang sosio kultural yang terjadi di sekitarnya.

Perkembangan Tarekat di Jawa Timur

Satu sisi dari kehidupan pesantren adalah bidang tasawuf, wujudnya adalah amalan-amalan tarekat yang juga bersumber dari Timur Tengah. Tarekat yang banyak berkembang di Indonesia adalah Naqsabandiyah. Di Jawa Timur tarekat Naqsabandiyah mulai berkembang pada pertengahan abad 19 (van Bruinessen,1996; van Den Berg, 1883). Sedang tarekat yang lain (kecuali Qadiriyah wa Naqsabandiyah) tidak ditemukan sumber yang menunjukkan dengan pasti kapan mulai berkembang di Jawa Timur. Sumber kolonial hanya menginformasikan bahwa tarekat Qadiriyah telah berkembang di Kediri sejak lama (ANRI 1981; Lith, 1917). Penelitian ini hanya mengkaji tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berpusat di Pesantren Rejoso Jombang yang mulai dkembangkan tahun 1899.

Pesantren Rejoso Jombang menjadikan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas pesantren. Tarekat tersebut diajarkan pertama kali oleh Kiai Kholil menantu Kiai Tamim pendiri dan pengasuh Pesantren Rejoso. Kiai Kholil mengambil sanad kemursyidan dari K.H. Achmad Chatib Sambas (Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, 1997).

Tarekat qadiriyah wa naqsabandiyah yang berkembang di Pesantren Rejoso berbeda dengan tarekat Qadiriyah dan Naqsaban-diyah di tempat lain, khususnya dalam pengorganisasiannya. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara lain bahwa tarekat yang berkembang di Pesantren Rejoso tidak mengenal amalan suluk secara khusus dan semata-mata bersifat askestis (keakheratan), amalan keduniawian sepenuhnya mengikuti paham ahlus sunnah wal jamaah (Wawancara dengan K.H. Dimyati, Mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sekarang di pesantren Rejoso Tanggal 8 Februari 2001).

Ajaran dasar tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah menjadikan seseorang agar selalu dekat dengan Allah Subhana-wata'ala. Untuk itu seseorang harus dapat mencapai *maqam* tertentu dengan latihan-latihan yang teratur dan berkesinambungan. Dalam proses latihan tersebut diperlukan

seorang guru (Mursyid) agar tidak salah arah. Jika seorang pengikut berhasil menjalankan latihan dengan baik, maka ia akan mencapai maqam tertinggi yakni ma'rifat. Latihan yang ditempuh antara lain melalui zikir secara teratur setiap selesai salat wajib dan pada acara khususiyah tarekat.

Seorang yang akan menjadi pengikut tarekat harus menjalani bai'at dihadapan mursyid. Bai'at adalah proses ikrar setia kepada guru (mursyid) untuk selalu taat dan patuh menjalankan tuntunannya dalam menjalan amalan tarekat. Acara prosesual bai'at merupakan serangkaian pembacaan amalan zikir dan doa yang dipimpin oleh Mursyid (Tamim, Tt). Setelah di bai'at seorang pengikut tarekat setidaknya harus hadir lagi selama tujuh kali pertemuan dalam acara khususiyah yang dipimpin oleh Mursyid untuk menyempurnakan pemahaman dan perilaku ritual tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah.

Perkembangan tarekat pada masa Kiai Kholil (kemursyidan I) dari tahun 1895-1937 dari segi jumlah pengikut tidak begitu banyak, hal ini salah satunya disebabkan adanya persyaratan usia di atas 40 tahun bagi seseorang yang ingin menjadi pengikut. Namun keterbatasan jumlah pengikut tersebut diimbangi dengan keberhasilan dalam kaderisasi penerus kepemimpinan tarekat, sehingga menjadi pondasi bagi perkembangan tarekat di masa-masa berikutnya. Dilihat dari segi perluasan wilayah pengaruh tarekat yang berpusat di Pesantren Rejoso tersebut dapat dinilai cukup luas, karena tidak hanya di sekitar Jombang, tetapi juga Jawa Timur, Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Di samping Romli Tamim (mursyid II) di Jombang, di Surabaya dan di Blitar terdapat khalifah yang berhasil menyebarkan tarekat di wilayah-wilayah yang lebih luas (Sumber tentang masalah ini diambil dari catatan Pribadi Kiai Fatah santri Kiai Kholil).

Sejak awal perkembangannya di Pesantren Rejoso ada hubungan fungsional antara tarekat, kiai, dan pesantren. Masing-masing mempunyai fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Bersamaan dengan semakin populernya nama Pesantren Rejoso, mengangkat pula nama kiai sekaligus juga memperkenalkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Hubungan fungsional tersebut kemudian dilembagakan sebagai tujuan dari pendidikan Pesantren Rejoso. Seorang alumni Pesantren Rejoso diharapkan dapat menjadi seseorang yang memiliki pemahaman ilmu agama yang memadai dan pengamal tarekat yang taat.

Aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah keberadaan pesantren sebagai pusat aktivitas, bersatunya kharisma kiai pesantren dengan kharisma guru tarekat, dan keberhasilan kaderisasi. Keberadaan Pesantren Rejoso sebagai pusat aktivitas tarekat sangat menguntungkan perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, karena Mursyid dengan mudah mengadakan konsolidasi dan memperlancar acara-acara khususiyah tarekat. Bersatunya kharisma kiai dan kharisma Mursyid sangat menunjang perkembangan tarekat, karena menimbulkan rasa ketaatan yang lebih kuat. Seorang kiai memiliki kharisma yang menimbulkan pengaruh luas di kalangan masyarakat, sedang kharisma seorang mursyid melahirkan ikatan emosional yang melembaga di kalangan pengikutnya. Dengan demikian tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan aman.

Keberhasilan pengkaderan adalah aspek yang menentukan perkembangan tarekat di masa-masa berikutnya. Perpindahan kemursyidan dari Kiai Kholil ke Kiai Ramli Tamim telah menyatukan kepemimpinan pesantren dan kepemimpinan tarekat dengan seluruh implikasinya. Kiai Romli Tamim adalah anak Kiai Tamim pendiri Pesantren Rejoso, dengan demikian implikasi psikologis terhadap santri dapat dihilangkan. Kiai Romli Tamim juga adik ipar Kiai Kholil, di bai'at, dan ditunjuk langsung oleh Kiai Kholil sebagai mursyid pertama untuk mengganti dirinya, dengan demikian implikasi psikologis pada pengikut tarekat terus berkesinambungan.

Hubungan Pesantren dengan Politik Pendidikan Kolonial

Perkembangan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pada awal abad XX menunjukkan adanya tanda-tanda ke arah perubahan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren, khususnya menyangkut metode dan materi pendidikan yang diberikan.

Pesantren Tebuireng merupakan pesantren pertama yang mengawali pembaharuan di kalangan pesantren (Yunus, 1979). Sistem madrasi (klasikal) dan memasukkan materi pengetahuan umum mulai dilakukan sejak tahun 1919. Dua hal tersebut belum lazim dilaksanakan di ling-kungan pesantren. Apa yang dilakukan oleh Pesantren Tebuireng diikuti oleh Pesantren Denanyar pada tahun 1920, bahkan melangkah lebih jauh dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk menempuh pendidikan

pesantren.

Tahun 1926 tercatat menjadi tahun penting dalam sejarah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, karena pada tahun tersebut berdiri sebuah pesantren yang benar-benar menggunakan cara modern. Istilah modern digunakan untuk menyebut cara pengelolaan yang mengikuti tata cara lembaga pendidikan modern. Aktivitas yang dilaksanakan melalui sebuah perencanaan dengan konsep, tujuan dan target yang jelas (Pondok Gontor, 1941). Mendirikan dan mengembangkan pesantren dengan perencanaan terprogram sejak awal belum dikenal di kalangan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya pembaharuan sistem pendidikan di lingkungan pesantren terdapat dua aspek yang menonjol. Pertama, pesantren semakin mempertegas dirinya sebagai pendidikan yang bercorak kerakyatan dengan basis masyarakat pedesaan, dan membuka peluang lebih luas kepada seluruh kalangan masyarakat. Kedua, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang prestisius mampu mengangkat status seseorang di tengah-tengah masyarakat. Menjadi harapan sebagian anggota masyarakat untuk dapat mengirimkan anak-anaknya ke pesantren yang tergolong induk, seperti Tebuireng, Rejoso, Lirboyo, atau Gontor (Mastuhu, 1994).

Masuknya materi non agama ke pesantren melalui madrasah telah membuka cakrawala baru bagi santri untuk mengetahui dunia ilmu pengetahuan. Sampai tahun 1942 hampir semua pesantren induk telah memiliki madrasah, walaupun tidak semua memasukkan materi pengetahuan umum. Kondisi ini telah menempatkan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan yang ada di masyarakat selain pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Satu hal yang tidak hilang dalam pendidikan di pesantren adalah ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Pesantren sebenarnya tidak langsung di bawah naungan politik pendidikan kolonial, karena politik pendidikan kolonial berdasar pada pemikiran bagaimana melibatkan pribumi terdidik dalam sistem pemerintahan kolonial (Brugman dalam Baudet dan Brugman, 1987). Namun karena pesantren sebagai lembaga pendidikan akhirnya juga kena dampak dari politik pendidikan pemeritah kolonial. Sikap pemerintah kolonial terhadap pesantren termasuk dalam kemasan politik Islam (van den Bosh, 1941: Suminto, 1996), yang menempatkan pesantren sebagai aspek Islam yang perlu dibatasi pengaruh dan penyebarnya di tengah-tengah masyarakat.

Politik Islam kolonial Belanda sebagaimana disarankan oleh Snouck Hurgronje adalah memisahkan Islam sebagai tuntunan Ibadah dengan Islam sebagai aspirasi politik. Saran tersebut setelah mengadakan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Islam (*ANRI, Surat Snouck Hurgronye tanggal 18 Mei 1890 dalam Bundel Besluit No. 4, Juni 1890).* Untuk itu kegiatan para haji, guru agama, dan pesantren harus diawasi agar tidak mengarah kepada aktivitas yang dapat membahayakan pemerintah kolonial. Untuk menjalankan saran Snouck Hurgronje pemerintah kolonial mengeluarkan Ordonansi Guru pada tahun 1905. Ordonansi tersebut berisi kewajiban para guru agama untuk meminta ijin kepada Bupati bagi yang ingin mengajar. Ordonansi tersebut juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan lain bagi guru dan kewenangan bagi Bupati untuk mengambil tindakan jika guru melanggarnya (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1905, No. 550; Suminto, 1996).

Ordonansi guru bagi pesantren sebenarnya merupakan persoalan yang tidak mudah, karena pesantren adalah lembaga yang cenderung non administratif. Daftar guru, santri, kitab kuning yang diajarkan tidak terdokumentasi dengan baik. Namun demikian walau dalam posisi sulit tidak terdapat gejolak di kalangan pesantren yang menunjukkan adanya penolakan terhadap ordonansi tersebut. Bahkan di Pesantren Tebuireng diketemukan surat ijin mengajar K.H. Hasyim Asy'ari dari Patih Surabaya. Surat ijin tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa pesantren berusaha untuk mentaati Ordonansi tersebut.

Ordonansi Guru tahun 1905 ternyata tidak efektif untuk membendung perkembangan pesantren, sehingga diperbaharui dengan Ordonansi Guru tahun 1925. Perubahan yang mendasar dalam isi Ordonansi guru tersebut adalah bahwa guru agama tidak perlu ijin mengajar, akan tetapi harus memberitahukan kepada Bupati aktivitas yang akan dilaksanakan. Walau sudah diperbaharui banyak pihak menilai bahwa ordonansi tersebut tidak efektif dan tidak adanya gunanya, sehingga Van Der Plas mengusulkan untuk dihapus saja karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada (Brugman, 1994). Reaksi pesantren terhadap ordonansi guru tahun 1925 disuarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang menuntut dengan tegas supaya Ordonansi Guru tersebut dicabut karena dinilai menghambat siar Islam (Soetjiatiningsih dan Sutrisno Kutoyo 1986).

Menghadapi semaraknya kehadiran pendidikan modern model barat di masyarakat, baik yang diselenggarakan pemerintah kolonial, Missionaris, Muhammadiyah, maupun Taman Siswa, pesantren melakukan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum dalam materi pengajaran kepada santri. Untuk menyatukan sikap menghadapi munculnya pendidikan modern tersebut kiai-kiai yang tergabung dalam NU mendirikan Lembaga pendidikan Ma'arif yang mewadahi pendidikan modern yang dikelola kalangan pesantren.

Berkembangnya pesantren pada awal abad XX bersamaan waktunya dengan lahirnya nasionalisme Indonesia. Pesantren tidak terlibat secara langsung dalam gerakan kebangsaan tersebut, salah satu sebabnya bangkitnya nasionalisme di Indonesia dipelopori oleh kelompok priyayi (Kuntowijoyo, 1991).

Di Jawa Timur banyak terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, akan tetapi kiai-kiai tersebut tidak memiliki pesantren. Misalnya Kiai Kasan Mukmin Gedangan Sidoarjo, Kiai Aminah Jember, dan Kiai Boelkim Kediri (ANRI, 1981). Masa-masa awal kebangkitan nasional pesantren cenderung bersikap pasif, khususnya di Jawa Timur bagian timur yang oleh Belanda berhasil dikondisikan sedemikian rupa karena keberhasilan *landreform* (Kuntowijoyo, 1991).

Hubungan pesantren dengan nasionalisme dapat dilihat dari perilaku politik para kiai sebagai pengasuh pesantren. Setidaknya ada tokoh yang mewakili pesantren dalam kancah pergerakan nasional, yakni K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. A. Wahab Chasbullah, dan K.H. A. Wahid Hasyim. Tiga orang tersebut banyak terlibat dalam memberikan warna keislaman dalam dunia pergerakan. K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendukung ide Indonesia berpalemen (Atjeh, 1957), ia juga salah seorang pendiri NU organisasi sosial keagamaan yang memiliki kekuatan sosial sangat kuat dan pengaruh sangat luas dalam masyarakat (*ANRI, Seri 2E Reel Film No 10, MvO Residen Mojokerto, 1930. Lihat pula ANRI, Seri 2E Reel Flim No 11, MvO Asisten Residen Madura Timur, 1932*). K.H.A. Wahab Chasbullah, penerus kepemimpinan Tambakberas sejak tahun 1913 telah terlibat dunia pergerakan di Surabaya, antara lain mendirikan kelompok diskusi *Tasfirul Afkar*, mendirikan organisasi bernama *Nahdlatul Wathon* (Kebangkitan Tanah Air) dan mendukung berdirinya organisasi pemuda *Syubhanul Wathon* atau Pemuda Tanah Air (Zuhri, 1972). K.H.A. Wahab Chasbullah merupakan konseptor lahirnya NU pada tahun 1926. Dua orang tokoh tersebut kemudian dilanjutkan oleh

generasi kedua yakni K.H. Abdul Wahid Hasyim yang sejak awal tahun empatpuluhan memilih terjun di dunia pergerakan dari pada mengurus pesantren. Secara nyata kalangan pesantren terlibat dalam pergerakan nasional setelah NU berdiri.

KESIMPULAN

Wujud perkembangan pesantren di Jawa Timur abad pada XX adalah perluasan jalinan mata rantai pesantren yang terjadi pada masa sebelumnya. Jalinan mata rantai pesantren yang terjadi merupakan bentuk penyebaran islam ke wilayah-wilayah yang yang belum dianggap Islami, dalam hal ini adalah kantong-kantong komunitas peninggalan Hindu Majapahit dan Kejawen. Jalinan mata rantai pesantren tersebut terjadi karena adanya hubungan kekerabatan antara kiai pendiri pesantren, hubungan kiai-santri, dan hubungan kesejawatan antar santri. Hal tersebut didukung dengan kharakter tradisi keilmuan yang berkembang di pesantren, yang menempatkan kiai sebagai panutan yang dijunjung tinggi. Lahirnya NU semakin memperkuat jalinan mata rantai pesantren, karena NU menjadi wadah dan media bagi kalangan pesantren untuk saling bertukar pikiran dan menyatukan sikap dalam menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan. Aspek eksternal pesantren yang ikut mempererat jalinan mata rantai pesantren adalah politik pendidikan kolonial yang memungkinkan berkembangnya pendidikan modern dalam masyarakat.

Tradisi intelektual yang berkembang di pesantren telah melahirkan suatu komunitas yang memiliki paham pemikiran keagamaan yang sama. Hal tersebut dikarenakan karena kitab-kitab kuning yang dipelajari cenderung memiliki materi yang sama. Ilmu pengetahuan keagamaan yang berkembang menunjukkan pola yang sama yakni, tauhid, fiqh, ilmu alat, dan ilmu pendukung yang lain. Paham pemikiran keagamaan yang berkembang di pesantren diklaim sebagai paham pemikiran ahlus sunnah wal Jamaah. Berisi antara lain mengikuti pemikiran Al Asyari'ah dalam bertauhid, mengakui dan melaksanakan empat mazhab dalam berfiqh, dan pemikiran Al Junaid Bagdadi dalam bertasawuf. Paham yang tersebar di kalangan pesantren juga menyebar di kalangan masyarakat, sehingga dapat dimaklumi jika di masa sekarang Jawa Timur merupakan kantong utama paham ahlus sunnah wal Jamaah dan pendukung terbesar NU di Indonesia.

Perkembangan tarekat qadiriyah wa naqsabandiyah yang berpusat di Pesantren Rejoso Jombang dapat berkembang dengan baik karena terdapatnya hubungan fungsional antara kiai, pesantren, dan keberadaan tarekat. Hal tersebut telah melahirkan berbagai situasi antara lain bersatunya kharisma kiai dengan kharisma mursyid (guru tarekat) dan keberhasilan kaderisasi. Dalam segi kuantitas anggota tarekat qadiriyah wa naqsabandiyah relatif belum banyak, akan tetapi dilihat perluasan penyebaran tarekat tampaknya berhasil baik karena meliputi seluruh pulau Jawa dan Madura.

Hubungan pesantren dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan kekuasan kolonial cukup adaptif, dalam arti tidak bersifat konfrontatif. Berbagai kebijakan politik kolonial, khususnya politik pendidikan tidak direspon secara langsung oleh pesantren. Hadirnya pendidikan modern sebagai akibat poltik etis Belanda disikapi pesantren dengan berbenah diri mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Munculnya kebangkitan nasional di Indonesia tidak melibatkan pesantren secara langsung, keterlibatan pesantren lebih diwakili oleh para kiai secara personal. Setelah NU lahir secara organisatoris pesantren mulai memasuki dunia pergerakan nasional lebih dalam.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Taufik. 1996. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique (ed.). 1989. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara.*Jakarta: LP3ES.

ANRI. 1930. *Seri 2E Reel Film No 10, MvO Residen Mojokerto.*

ANRI. 1932. *Seri 2E Reel Flim No 11, MvO Asisten Residen Madura Timur.*

ANRI. Tanggal 4 Nopember 1890. Departemen van Kolonien. Ag. No. 44.

ANRI. Juni 1980. *Surat Snouck Hurgronye tanggal 18 Mei 1890 dalam Bundel Besluit. No. 4.*

ANRI. 1981. *Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX.* Jakarta: ANRI.

Atjeh, Abubakar. 1957. *K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar.* Djakarta: Panitia Peringatan K.H.A. Wahid Hasyim.

Baudet, H dan I.J. Brugmans. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan.* penterjemah Amir Sutarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Catatan pribadi dari Kiai Fatah Karangkates, salah seorang murid Kiai Kholil

Chozin, NA. 1989. "Epistemologi Kitab Kuning" dalam *Pesantren.* No.1/Vol. VI, hlm. 16-17.

Departemen Agama. 1971. *Buku-buku yang Dipergunakan di Pondok Pesantren.* Jakarta: Balitbang.

Dhofier, Zamakhsyari. 1996. *Tradisi Pesantren: Suatu Studi tentang Pandangan Hidup Kiai.* Jakarta: LP3ES.

Giddens, Anthony. 1986. K*apitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. terjemahan Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press.

Hurgronje, Snouck. 1993. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII.* alih bahasa Soedarso Soekarno, Jakarta : INIS.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888.* Diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi.* Bandung: Mizan.

Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat. Y*ogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Lictman, Allan, J., and Vallerie French. 1978. *Historians and The Living Past.* Illionist: Haarlan Davidson, Inc.

Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. 1997. *Pondok Pesantren Darul Ulum.* Jombang: MPPP Darul Ulum.

Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren.* Jakarta: INIS.

Mas'udi, Masdar F. 1986. *Direktori Pesantren I.* Jakarta: P3M.

Pondok Modern Gontor. 1941. *Boekoe Peringatan 15 Tahoen Pondok Modern Gontor Ponorogo Java.* Ponorogo: PM Gontor.

Soetjiatiningsih, Sri dan Sutrisno Kutoyo. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur.* Surabaya: Depdikbud.

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1905, No. 550.

Suminto, Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda.* Jakarta: LP3ES.

Tamim, Romli, *Tsamrotul Fikriyah.* Jombang: Tanpa Penerbit, Tt.

Umam, Chotibul, dkk. "Spesifikasi Studi Agama Islam di Beberapa Pesantren Jawa Timur". *Laporan Penelitian* Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Tt.

Van Bruinessen, Martin. 1989. "Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaya" dalam *Pesantren.* No. 1/Vol. VI, hlm. 37.

Van Bruinessen, Martin. 1996. *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, Survey Historis, Geografis, dan Sosiologis.* Bandung: Mizan.

Van Bruinessen, Martin. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia.* Cet. III, Bandung: Mizan.

Van Den Berg, L.W.C. 1883. "Over De Devotie Der Naqsabandiyah in den Indischen Archipel" dalam *TBG* XXVIII. hlm. 158-175.

Van Den Berg, L.W.C. 1886. "Het Mohammedansche Godsddienst Onderwijs op Java en de Daarby Gebruike Arabische Boeken" dalam *TBG*, XXXI. hlm. 519-555.

Van Den Bosh, Amry. 1941. *The Dutch East Indies. Its Government, Problem and Politics.* Barkeley and Los Angeles: California University Press.

Van Lith, P.C.A. 1917. "De Tarekat's in Nederlands Indie" dalam *Koloniaal Tidsjchrip.* hlm. 725-737.

Weber, Max. 1956. *The Sociology of Religion.* Translated by Ephzam Fishof, London: Methuen & Co. Ltd.

Wawancara dengan K.H. Dimyati, (Mursyid tarekat qadiriyah wa Naqsabandiyah sekarang) di pesantren Rejoso Tanggal 8 Februari 2001.

Yafie, Ali. 1989. "Kitab Kuning Produk Peradaban Islam" dalam *Pesantren* No. 1/Vol. VI. hlm 3-11.

Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Mutiara.

Zuhri, Saifuddin. 1972. *Al Magfurlah K.H.A. Wahab Chasbullah, Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama.* Semarang: Yayasan K.H. Abdul Wahab Chasbullah dengan Yayasan Saifuddin Zuhri.